

BERTAHANNYA BANGSAWAN BONE DI TENGAH PERUBAHAN REZIM, 1811-1946

Suryadi Mapangara, disertasi Jurusan Sejarah, dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Desember 2010.

ABSTRACT

The implementation of the autonomy Law in the early 2001 in Indonesia has lead to the emergence of petty kings in several regions. However, the diversity of the local political history will be influenced or influence the ways in which regional autonomy are practiced by local elites. By taking the political history of Bone from 1811 to 1946 as a case study, this dissertation shows that the current petty kings have long been maintained by decendants of aristocratic elite in Bone. There are three interrelated factors that make the aristocrats in Bone are able to survive in maintaining their power until now; namely political marriages, social networks, and patron-client relationship.

The colonial government failed to understand three important factors embedded in the long political history of Bone. This lack of knowledge about history and political culture of Bone has led to ongoing conflict between Bone's aristocrats and the colonial government. By using local sources, *Lontara* and colonial sources, the dissertation attempts to provide balanced analysis of the dynamics of local political structures of Bone from the period 1811 to 1946.

Keywords: history, aristocrats, social network, political marriages, patron-client relationship, Bone, South Sulawesi.

LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak Kerajaan Bone mengambil alih peran politik dan sosial Kerajaan Gowa pasca-Perjanjian Bungaya pada tahun 1667, wilayah Sulawesi Selatan hampir seluruhnya dikuasai oleh elite bangsawan Bone. Perkawinan politik yang dibangun oleh Arung Palakka dengan

mengawinkan kemenakannya, La Patau, dengan putri penguasa Kerajaan Gowa dan Luwu, telah membuat darah bangsawan Bone menyebar hampir di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Jaringan kekuasaan melalui ikatan perkawinan antar daerah telah memperluas kontrol Bone dan itu berlanjut setelah Indonesia merdeka. Posisi bangsawan Bone menjadi penting di wilayah Sulawesi Selatan dan bahkan setelah Indonesia merdeka. Mereka memegang kuasa politik di wilayah ini, dibuktikan dengan posisi Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama yang merupakan keturunan bangsawan Bone.

Peristiwa yang terjadi di abad XIX memberi warna lain bagi kerajaan dan bangsawan Bone, yakni beralihnya strategi politik; dari politik kompromi ke politik protes. Selain melawan Inggris, elite penguasa Bone juga menolak kehadiran Pemerintah Hindia Belanda. Tetapi kemudian bangsawan Bone terpecah dua. Di satu pihak menolak kehadiran Belanda, di pihak lain menerima kehadiran Belanda. Pada waktu status Kerajaan Bone diubah menjadi “Kerajaan Pinjaman” pada tahun 1860, raja yang ditunjuk untuk menduduki tahta Kerajaan Bone harus mendapat izin dan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian, para bangsawan Bone masih tetap memiliki celah untuk tetap dapat bertahan.

Pada waktu pemerintah Hindia-Belanda sedang melakukan pasifikasi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal, Van Heutz (Poelinggomang 2004:46), Kerajaan Bone menjadi target utama karena dianggap terkuat dan berbahaya. Pada tahun 1905 serangan pun dilancarkan dengan kekuatan penuh tanpa melibatkan kerajaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone takluk kepada Belanda dan para elite bangsawannya dipinggirkan.

Pada tahun 1916, pemerintah Hindia Belanda memberi Kerajaan Bone status *zelfbestuur*. Para elit bangsawan dirangkul kembali dan diberi tempat untuk menduduki jabatan-jabatan yang selama ini ditiadakan, meskipun harus diketahui bahwa bangsawan yang dirangkul itu adalah mereka yang telah menunjukkan loyalitas yang tinggi. Bagi bangsawan yang dianggap berbahaya tetap disingkirkan. Dalam perkembangan berikutnya bangsawan berhasil membujuk Pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkat kembali seorang raja di Kerajaan Bone pada tahun 1931, yang selama ini kosong sejak raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, ditangkap pada tahun 1906.

Pada masa pendudukan Jepang, Kerajaan Bone dan para elite penguasanya dirangkul oleh Jepang. Dibentuk satu wadah yang dikenal dengan nama Sumber Dara Rakyat yang disingkat menjadi Sudara. Bangsawan Bone yang mempunyai pengaruh besar ditunjuk sebagai penasehatnya. Meskipun masa pemerintahan Jepang singkat, namun kontribusi besar yang diberikan oleh Jepang adalah menanamkan rasa nasionalisme (Wal 1971).

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, raja Bone, Andi Mappanyukki, kembali memegang peran penting, memproklamkan bahwa rakyat dan Kerajaan Bone berada di belakang Republik.

PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP

Permasalahan utama yang ingin diungkapkan dalam disertasi ini adalah perubahan di dalam Kerajaan dan bangsawan Bone, mulai dari intervensi kolonial sampai Indonesia merdeka. Intervensi pemerintah kolonial Inggris dan Belanda telah membawa perubahan dalam eksistensi politik kerajaan dan bangsawan Bone. Ada dua pertanyaan utama penelitian ini; *Pertama*, mengapa kerajaan Bone masih tetap eksis di tengah-tengah perubahan rezim yang berkuasa? *Kedua*, mengapa elit penguasa bangsawan Bone masih mampu mencari ruang untuk tetap bertahan, meskipun posisi kerajaan itu sudah terpinggirkan?

Periode kajian ini dimulai sejak pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1811. Dalam sejarah Sulawesi Selatan, tahun 1811 memberi arti penting dalam kelanjutan sejarah kerajaan Bone di masa-masa selanjutnya. Pada masa Inggris berkuasa, hak-hak istimewa yang selama ini dimiliki oleh Kerajaan Bone tidak diakui oleh Inggris. Penelitian ini berakhir pada tahun 1946, yaitu ketika terbentuknya Negara Indonesia Timur dalam Deklarasi Denpasar. Setelah terbentuknya Negara Indonesia Timur, perlawanan yang dilakukan oleh para bangsawan juga sudah berkurang. Banyak bangsawan yang kemudian ditangkap, dibuang dan dipenjarakan. Pemimpin-pemimpin pejuang juga mengalami hal yang sama. Sebagian bangsawan dapat dibujuk untuk masuk dalam lingkaran penyokong NICA, meskipun demikian terdapat juga bangsawan yang masih memegang *sirinya*.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Disertasi ini diharapkan akan menambah daftar panjang bahan rujukan dalam penulisan sejarah Indonesia, khususnya tentang Kerajaan Bone dan elite penguasa tradisional (bangsawan). Diakui bahwa sudah ada sejumlah buku yang membahas tentang bangsawan, namun tulisan ini memiliki kekuatan lain yaitu penggunaan sumber-sumber lokal, khususnya historiografi tradisional Bugis-Makassar yang dikenal dengan *lontarak*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Tingkat II, oleh banyak kalangan dikhawatirkan akan memunculkan raja-raja kecil yang memiliki kekuasaan yang sangat besar seperti yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini akan dapat melihat dinamika kerajaan dan bangsawan Bone, dalam menyikapi perubahan sejarah masyarakat yang muncul selama Kerajaan Bone berada di bawah kekuasaan elite tradisional.

TINJAUAN PUSTAKA

Banyak studi sosial yang berfokus pada daerah Sulawesi Selatan. Mattulada meneliti karya klasik Bugis-Makassar, yaitu *Latoa* untuk mengetahui pandangan orang Bugis, khususnya Bugis-Bone dalam bernegara dan bermasyarakat. Menurutnya tingkah laku politik orang Bugis Bone banyak dipengaruhi oleh petuah-petuah dari kalangan cerdik pandai orang Bugis di masa lampau. Selain itu, ia juga menjelaskan konsep kekuasaan, hak dan kewajiban seorang hamba kepada Raja dan sebaliknya hak dan kewajiban seorang Raja kepada rakyatnya. Meskipun secara kasat mata, Mattulada memaparkan konsep-konsep yang sangat ideal yang harus dimiliki oleh seorang raja seperti diterangkan dalam *Latoa*, namun harus diakui, karena naskah ini demikian disanjung dan dipercaya, maka tidak kurang pemimpin-pemimpin Bugis menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Heddy Shri Ahimsa Putra (1988) mempelajari perubahan sosial di Bantaeng dalam kaitan dengan hubungan bangsawan-rakyat yang dipantulkan dalam praktek hubungan *patron-client*. Hubungan *patron-client* antara bangsawan dan rakyat nampak mengalami perubahan.

Perubahan ini menurutnya disebabkan oleh pengalaman sejarah masa lalu. Untuk melihat mekanisme perubahan itu, Heddy menggunakan pendekatan sejarah yang berasal dari sumber-sumber Belanda. Menurutnya, peristiwa-peristiwa sejarah di masa lampau berpengaruh pada perkembangan budaya-politik dan hubungan sosial masyarakat Bantaeng. Ia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa hubungan *patron-client* di Bantaeng mengalami perubahan seiring dengan peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Perubahan itu tampak pada penghormatan rakyat terhadap kaum elite bangsawan yang jauh berkurang. Sejauhmana hubungan *patron-client* di kalangan bangsawan Bone juga mengalami perubahan seperti ditemukan dalam kasus Bantaeng?

Burhan Magenda (1989) yang meneliti kelompok aristokrat di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, menjelaskan, bahwa kelompok aristokrat di ketiga daerah ini tetap dapat bertahan dalam rezim yang berubah. Bertahannya kelompok aristokrat ini sepanjang sejarahnya mulai dari abad ke-19 sampai ke rezim pemerintahan Orde Baru disebabkan karena mereka memegang peranan penting dalam setiap episode sejarah. Mereka memiliki strategi tertentu dalam merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Respons yang diberikan itu tidak sama di ketiga wilayah yang diteliti, karena letak geografis suatu daerah turut menentukan tingkah laku politik yang mereka mainkan. Makin terbuka daerah itu makin mudah menerima sesuatu yang baru dari luar.

Edward L. Poelinggomang (2002) yang mengambil wilayah kajiannya Makassar melihat bahwa intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda telah mengakibatkan kehidupan bangsawan menjadi kocar kacir. Menurutnya, usaha untuk menghilangkan peran dan fungsi bangsawan di Makassar tidak saja berdampak pada bangsawan itu sendiri, tetapi juga pada golongan *to-maradeka* (orang merdeka/rakyat biasa) yang menjadi pengikut setia bangsawan dan para petani yang menggarap persawahan. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan bangsawan, yang pada kenyataannya memunculkan hubungan kekuasaan bilateral antara yang memerintah dan yang diperintah.

Willem Ijzereef (1994) memfokuskan penelitiannya pada keberadaan elit bangsawan di daerah Bone dan Polongbengkeng. Menurutnya,

tidak ada perubahan yang fundamental tentang eksistensi politik yang dimainkan oleh kelompok bangsawan, terutama di Bone. Penelitian yang mengambil lingkup temporal 1850 – 1950, ini menjelaskan sebuah keluarga bangsawan Bone yang telah membangun kekuasaan mereka di dua desa yaitu Kajuara dan Mare yang dapat dilihat dari daftar silsilah keturunan mereka. Tampaknya Willem Ijzereef secara tersirat ingin mengatakan bahwa ikatan perkawinan yang dibina mungkin merupakan salah satu andil sehingga bangsawan itu tetap dapat bertahan. Menurutnya, secara keseluruhan hubungan politik dicirikan sebagai kekuatan pusat dan pinggiran yang saling tarik menarik. Ada beberapa kampung dan desa yang memiliki hubungan yang kuat dengan para bangsawan di pusat kerajaan (Ijzereef 1994:239)

KERANGKA TEORETIK

Ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam perkembangannya saling ‘isi-mengisi’. Penggunaan ilmu-ilmu sosial sebagai metode pendekatan dalam meneropong sejarah telah banyak digunakan. Penggunaan teori dan konsep ilmu-ilmu sosial tidak saja akan menambah tajam analisis, tetapi dapat mempermudah melakukan interpretasi. Tulisan ini dapat dikategorikan sebagai sejarah politik. Salah satu aspek yang diteliti dalam sejarah politik adalah kekuasaan (*power*). Berbicara mengenai kekuasaan berarti berbicara pula mengenai negara atau kerajaan yang memiliki otoritas untuk berkuasa.

Salah satu teori yang dianggap sesuai untuk meneliti hubungan antara Kerajaan Bone dan Bangsa Inggris adalah teori konflik. Menurut Kamus Webster, konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Teori konflik yang digunakan adalah teori yang dibangun oleh dua orang ahli Psikolog Sosial, yaitu Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang melihat konflik itu adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya yang ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niatnya.

Teori konflik ini juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara Kerajaan Bone dan Belanda di abad XIX sampai di abad XX.

Hubungan yang kurang baik antara Kerajaan Bone dan Belanda banyak diakibatkan oleh persepsi yang salah, tidak saja pada soal-soal yang berwujud material, tetapi juga yang immaterial. Konflik yang muncul antara kedua belah pihak dapat diselesaikan atas lima solusi atau strategi. *Pertama* adalah *contending* (bertanding), yaitu tindakan fisik untuk mendapatkan apa yang disengketakan atau dikonflikkan. *Kedua*, *yielding* (mengalah) yaitu bersedia menerima kekurangan yang sebetulnya diharapkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. *Ketiga*, *problem solving* (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, *inaction* (diam) yaitu tidak melakukan apa pun (Pruit dan Ubin 2009:4-6).

Untuk menjawab pertanyaan mengapa Pemerintah Hindia Belanda melakukan ekspedisi militer ke Kerajaan Bone pada tahun 1905, digunakan teori imperialisme dari dua orang ahli sejarah Inggris yang bernama John Gallagher dan Ronald Robinson (1979:185) mengenai peralihan kekuasaan dari informal ke formal. Menurut mereka, pada awal penerapan kekuasaan cenderung dilakukan secara informal selama hal itu masih dapat dipertahankan, namun sewaktu-waktu dapat diubah menjadi aneksasi formal jika diperlukan.

METODE DAN SUMBER PENELITIAN

Disertasi ini menggunakan sumber-sumber lokal, yaitu *lontarak*. Memang ada kesulitan menggunakan *lontarak*, sebagai sumber dalam penulisan sejarah, karena harus dapat memilah-milah bagian yang dianggap mitos atau pun tidak. Meskipun demikian, cerita mitos yang dianggap mungkin bertentangan dengan fakta, namun fungsi penceritaan mitos dapat dipakai untuk melihat budaya politik suatu masyarakat. Selain itu, dalam banyak *lontarak*, tidak ditemukan penanggalan, satu hal yang begitu diperhatikan oleh sejarawan, terutama untuk menjawab pertanyaan kapan (*when*). Kesulitan ini dapat teratasi dengan melakukan perbandingan dengan sumber-sumber lainnya yang kira-kira sezaman. Selain itu pula, ada *lontarak* yang memakai penanggalan, misalnya *lontarak* Catatan Harian Raja-Raja Bugis dan juga Makassar. Untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan penggunaan *lontarak*, maka dilakukan kritik terhadap sumber, baik kritik *intern* maupun *ekstern*.

Oleh karena penelitian sejarah sangat tergantung pada sumber tertulis, maka perhatian akan diarahkan pada dokumen-dokumen yang tersimpan di arsip, (di Makassar, Bone, Jakarta dan Belanda), surat kabar, publikasi sumber, sumber lisan, buku-buku, dan artikel-artikel, baik yang berhubungan langsung atau tidak dengan objek penelitian (Kuntowijoyo 1994:19-32).

HASIL PENELITIAN

Kerajaan Bone terbentuk karena adanya perjanjian antara ke tujuh penguasa wilayah dengan To-manurung. Perjanjian yang dibangun itu menempatkan To-manurung sebagai raja pertama di Kerajaan Bone. Perjanjian itu merupakan alat legitimasi bagi raja-raja Bone selanjutnya untuk tetap dapat bertahan. Dalam perkembangannya kemudian, muncul dua kelompok. Kelompok pertama dikenal dengan kelompok bangsawan, terdiri atas keturunan *To-manurung*, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok orang biasa. Untuk tetap dapat berkuasa, kelompok bangsawan menggariskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya perkawinan. Kelompok bangsawan hanya diperkenankan untuk menikah dengan kelompok bangsawan sendiri.

Pada masa kekuasaan Arung Palakka, raja Bone XVI, dilakukan perkawinan politik. Arung Palakka yang tidak mempunyai keturunan telah memilih kemenakannya La Patau Matanna Tikka sebagai pewaris tahta Kerajaan Bone. Agar bangsawan Bone tidak terbatas berkuasa atas wilayah Bone saja, perkawinan politik dibangun dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Misalnya dengan Gowa, Luwu, dan Soppeng. Perkawinan politik ini memberi peluang besar untuk elite bangsawan Bone untuk berkuasa atas kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Sampai akhir kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan abad ke-18, pengaruh dan kekuasaan bangsawan begitu luasnya, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi kerajaan yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan bangsawan Bone.

Periode berikutnya, masa pemerintahan kolonial Inggris (1811-1816), hubungan antara Kerajaan Bone dengan Inggris kurang harmonis, karena Bone menolak kehadiran Inggris. Pada tanggal 6 Maret 1812, dilakukan serah terima antara Gubernur Makassar, Letnan Kolonel Johan Caesar van Wikkerman (1809-1812) kepada Richard Philips

(1812-1814). Serah terima ini juga dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pegawai pemerintah setempat untuk tunduk pada kekuasaan Inggris, dan kepada pejabat Inggris yang ditempatkan pada *East Indian Company* (EIC) di Makassar. Upacara ini berlangsung dalam Benteng Fort Rotterdam (“Proclamation Placates, 6 Maret 1812”. *Koleksi ANRI : bundel Makassar, No. 291/6*).

Sehari setelah itu, Residen Philips mengeluarkan pernyataan yang berisikan antara lain: Makassar terbuka untuk semua pedagang dari koloni bangsa Eropa yang berada di bagian Timur Tanjung Pengharapan. Hukum dan kebiasaan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan di Makassar tetap dipertahankan, dan Pemerintah Inggris akan berusaha memajukan kesejahteraan penduduk. (“Proclamation Placates, 7 Maret 1812”. *Koleksi ANRI : bundel Makassar, No.291/6*). Selain itu, Residen Philips melakukan penghapusan dan keringanan pajak gerobak angkutan, kuda beban dan candu (Polinggomang, 2002:58). Pada tanggal 18 Nopember 1812, Pemerintah Inggris mengeluarkan satu kebijakan yang melarang perdagangan budak. Menindaklanjuti kebijakan itu, pada tanggal 6 Januari 1813 Philips menyatakan larangan impor dan ekspor budak dalam wilayah Makassar dan daerah taklukannya. (“Proclamation Placates, 6 Januari 1813”. *Koleksi ANRI : bundel Makassar, No.291/6*).

Di lain pihak, Kerajaan Bone berusaha untuk menanamkan kekuasaan dan pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Elite bangsawan Bone mencoba untuk menguasai Kerajaan Gowa, dengan jalan menguasai *kalompoang* (benda kebesaran kerajaan) Kerajaan Gowa, dan kemudian menempatkan Arung Mampu menjadi raja di Kerajaan Gowa. Usaha itu ditentang oleh Inggris.

Inggris tidak saja meminta *kalompoang* tersebut, namun juga menolak Arung Mampu sebagai raja di Kerajaan Gowa. Sikap yang ditunjukkan oleh Inggris mengundang reaksi keras dari para penguasa Kerajaan Bone. Konflik antara kedua kuasa ini kemudian diakhiri dengan perang. Para penguasa Bone yang menempati wilayah Bontoala pasca-Perjanjian Bungaya 1667 dibumihanguskan oleh Inggris, dan memaksa penguasa Bone angkat kaki dari Bontoala dan kembali ke Bone. Perang antara Inggris dan Bone tidak menghasilkan putusan politik karena pada tahun 1816, Inggris harus meninggalkan Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1816 Belanda kembali memegang kekuasaan di Hindia Belanda, termasuk di Sulawesi Selatan. Kehadiran Belanda juga mendapat penolakan dari elit penguasa Kerajaan Bone. Munculnya sikap yang demikian itu, memaksa Van der Capellen mengambil inisiatif untuk segera mengatasi konflik itu. Raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan diundang secara pribadi oleh Van der Capellen. (Kern 1947:79; Meinsma, 1873: 205) Surat undangan itu tidak semuanya dipenuhi. Tanete dan Suppa, sekutu utama Bone, merupakan dua di antara sekian banyak kerajaan yang secara terang-terangan menolak hadir untuk mengikuti ajakan Pemerintah Hindia Belanda.

Perundingan pada tanggal 4 Juli 1824, menghasilkan putusan yang diharapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Agustus 1824 ditandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui yang disebut *Contract Bungaya te Oejoeng Pandang* di Makassar tanpa kehadiran Raja Bone. Penolakan Kerajaan Bone berbuah perang. Pada tahun 1824, Pemerintah Hindia Belanda melancarkan serangan atas Kerajaan Bone. Usaha yang dibangun Belanda untuk menuntaskan perang ini mengalami hambatan, karena meletusnya perang Diponegoro di Pulau Jawa. Kegagalan ini menjadikan hubungan Belanda dan Kerajaan Bone semakin renggang. Perang ini telah memunculkan dua kubu. Kubu pertama menginginkan untuk melanjutkan perang (kubu raja) dan kubu kedua, yakni kubu *To-marilalang* memilih jalan damai.

Hubungan antara raja dengan *to-marilalang*, yang secara tradisional sangat dekat dan erat, tidak saja oleh sejarahnya yang panjang, tetapi juga karena keduanya harus menjalin kerjasama untuk membentuk satu kekuatan. Kerjasama itu biasanya dibangun lewat perkawinan, seperti halnya pada diri *to-marilalang* La Mappangara Arung Sinrie yang memiliki hubungan darah dengan Raja Bone.

Setelah kematian raja Bone, I Manning Arung Data pada tahun 1835, ia digantikan oleh saudaranya La Mappasilling Arung Panyili menjadi raja Bone ke-25. (*Lontarak Akkarungeng ri Bone*). Pada masa awal pemerintahannya, suhu politik di Kerajaan Bone sedikit memanas dengan meningkatnya konflik antara mereka yang pro dan kontra terhadap kehadiran Belanda. Keadaan itu membuat raja Bone sangat hati-hati dalam melakukan tindakan, agar tidak mengecewakan salah satu pihak. Oleh karena desakan yang sangat kuat dari dalam, akhirnya pada tahun 1836 raja yang baru ini terpaksa memulihkan kembali kedudukan

to-marilalang La Mappangara, yang sebelumnya memutuskan untuk meninggalkan Bone dan mengungsi ke Maros. Berkat usaha-usaha yang dilakukan oleh La Mappangara, akhirnya pada tahun 1837 Raja Bone bersedia membuka perundingan-perundingan dengan Pemerintah Hindia Belanda. (Memorie van Overgave 1948: 31; Abdurrazak Daeng Patunru dkk. (1994: 253-254; Perelaer (1872:86).

Dalam tahun 1838, utusan Gubernur Makassar Letnan Krovel, dan *To-marilalang* La Mappangara Arung Sinri, berhasil menggerakkan Arung Panyili untuk mengadakan perdamaian. Pada tanggal 13 Agustus 1838, ditandatangani satu perjanjian persahabatan. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini merupakan satu kemajuan yang sangat positif di tengah munculnya konflik di daerah ini sehubungan dengan kehadiran Belanda. Kepuasan itu semakin bertambah dengan sikap tegas Raja Bone, Arung Panyili yang menolak uluran tangan James Brooke untuk membuat satu perjanjian persahabatan pada tahun 1840 (*Memorie van Overgave*, 1948: 31; Abdul Razak Daeng Patunru (1994); Perelaer (1872:87 – 88).

Ketika Raja Bone Arung Panyili mangkat, *Dewan Adat Pitu* melantik La Parenrengi Arung Pugi sebagai raja Bone. Pelantikan itu ditolak oleh Singkeru Rukka dan para pengikutnya. Pada bulan Juni 1853, Singkeru Rukka Aru Palakka datang ke Makassar, melaporkan kepada Belanda, bahwa keadaan di Kerajaan Bone sekarang aman dan stabil untuk mengadakan perubahan besar seperti yang dikehendaki oleh rakyat Bone (Koleksi ANRI, *Reel No. 31, Mvo Serie 1^e*). Untuk mencari tahu apakah hal itu benar, Gubernur *Celebes* dan Daerah Taklukan mengunjungi Barru dalam perjalanannya ke Pantai Barat, tempat Achmad Singkeru Rukka tinggal. Selain itu, Gubernur mencari informasi tentang keadaan yang sedang terjadi di Bone dari raja Tanete dan Sidenreng (*Algemene Overzigt van Buitenbezittingen. No. 1, register 1852*).

Pemerintah Hindia Belanda merasa senang dengan munculnya perpecahan dalam istana Kerajaan Bone. Selama ini Pemerintah Hindia Belanda selalu menunggu *moment* yang tepat untuk bertindak, terutama di Kerajaan Bone. Selama ini, Kerajaan Bone selalu dianggap menjadi duri dalam daging bagi perluasan kekuasaan dan pengaruh kolonial Belanda. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda memperhitungkan dengan matang segala tindakan politik yang akan diambil.

Harapan Achmad Singkeru Rukka tidak mendapat tanggapan yang berarti dari Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda belum dapat memastikan, bagaimana bentuk hubungan dengan Achmad Singkeru Rukka jika permintaannya dikabulkan. Pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa hubungan yang selama ini dibina sudah cukup memadai. Selain itu, Pemerintah Hindia Belanda selama ini masih lebih mengarahkan perhatiannya pada kebijakan politik yang ada di Pulau Jawa, sehingga bagi kolonial Belanda, selama hubungan dengan Bone tidak menimbulkan gejolak yang berarti, maka cenderung dibiarkan. Terlebih lagi Achmad Singkeru Rukka tidak berada dalam wilayah kekuasaan Belanda, dan itu berarti Pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki wewenang untuk membantunya, meskipun hal itu dapat saja dilakukan.

Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Hindia-Belanda kembali menaruh perhatian dengan apa yang terjadi di Bone. Hal ini dikarenakan kelompok anti Belanda kian menguat, terutama raja-raja Bone yang telah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Belanda. Oleh karena itu, apa yang sedang terjadi di Kerajaan Bone dan permohonan dari Singkeru Rukka, harus mendapatkan perhatian kembali. Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda tidak akan mengambil tindakan perang terhadap raja Bone, selama dia diakui sebagai raja yang sah dan ternyata tidak melawan pemerintah.

Pada tanggal 16 Februari 1857, Raja Bone La Parenrengi wafat, dan digantikan oleh istrinya, Besse Kajuara. Dalam menjalankan kekuasaannya, Besse Kajuara menunjukkan sikap bermusuhan. Sikap ini membuat Pemerintah Hindia Belanda mencari jalan untuk melunakkan sikap penguasa Kerajaan Bone. Salah satu jalan adalah dengan mendekati Achmad Singkeru Rukka, seorang bangsawan tinggi Bone yang menunjukkan rasa tidak puas hati selama ini. Pada masa Besse Kajuara berkuasa, atas persetujuan *Dewan Ade Pitu*, Achmad Singkeru Rukka diberi ampunan atas tindakannya selama ini. Setelah mendapat ampunan dari Besse Kajuara, Achmad Singkeru Rukka bersama pengikutnya kembali ke Bone.

Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh Besse Kajuara, mengakibatkan timbul konflik dan berakhir dengan perang. Pemerintah Hindia Belanda melakukan serangan pada tahun 1859 dan tahun 1860. Kerajaan Bone akhirnya tunduk dan Besse Kajuara meninggalkan Bone. Setelah

kekalahan Besse Kajuara, dengan persetujuan Pemerintah Hindia Belanda, pada tanggal 31 Januari 1860, Singkeru Rukka diangkat menjadi raja Bone XXIX dengan gelar Sultan Ahmad (1860 – 1871). Kekalahan Kerajaan Bone dan pengangkatan Singkeru Rukka menandai era baru dalam hubungan bilateral antara kedua penguasa ini.

Pada masa pemerintahan Singkeru Rukka, kehidupan politik di Kerajaan Bone dapat dikatakan berjalan baik. Semuanya ini dapat terwujud karena raja dan *Dewan Adat Pitu* Kerajaan Bone satu pikiran dalam menghadapi setiap permasalahan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Singkeru Rukka tetap menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di wilayah ini. Hubungan dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda tetap dijaganya, agar Belanda tidak terlalu masuk campur tangan dalam mengatur sendi-sendi kehidupan Kerajaan Bone. Hubungan yang dibina ini sedikitnya telah memuaskan hati Pemerintah Hindia Belanda, jika dibandingkan dengan tingkah laku politik yang diperlihatkan oleh raja-raja Bone sebelumnya.

Setelah wafat, ia digantikan oleh putrinya yang bernama Fatimah Banri. (*Lontarak Akkarungeng ri Bone*). Pada masa pemerintahannya, kekuasaan banyak dipegang oleh *To-marilalang* La Pawawoi Karaeng Segeri yang juga bertindak sebagai panglima perang. Keadaan mulai berubah ketika Fatimah Banri menikah dengan putra bangsawan tinggi dari Kerajaan Gowa, Karaeng Popo.

Setelah pernikahan itu, hubungan antara Kerajaan Bone dengan Gowa semakin dekat. Kebencian sebagian besar bangsawan Gowa terhadap Belanda juga mulai masuk ke dalam istana Kerajaan Bone, dan ini berarti bahwa kelompok anti Belanda semakin besar dan meluas di kalangan bangsawan. Hal ini diperparah lagi karena setelah Fatimah Banri menikah, yang lebih banyak memegang peran dalam pemerintahan adalah Karaeng Popo. Peran besar yang dimainkan oleh Karaeng Popo, diperkuat lagi ketika penguasa Kerajaan Bone memberi gelar kepada beliau dengan gelar *Arung Palakka*. Gelar *Arung Palakka* adalah pintu awal bagi seseorang untuk menduduki jabatan raja di Kerajaan Bone.

Setelah kematian Fatimah Banri, *Dewan Adat Pitu*, para hakim, kerabat raja Bone dan rakyat sepakat untuk menunjuk I Bunga Sutra Daeng Bau Arung Apala yang berumur 13 tahun menjadi raja Bone. (I Mallaq Daeng Mabela, *Lontarak Rumpakna Bone*). Karaeng Popo berusaha untuk

menggantikan istrinya, namun hal itu tidak disetujui oleh *Dewan Adat Pitu*. Karena banyak yang tidak setuju, utamanya mereka yang berpihak kepada Belanda. Panglima pasukan Kerajaan Bone meninggalkan Bone dan memilih tinggal di Sinjai. Ia adalah penyokong kuat La Pawawoi Karaeng Segeri, dan mengatakan bahwa ia tidak akan kembali lagi ke Bone, jika La Pawawoi Karaeng Segeri tidak diangkat menjadi raja menggantikan Fatimah Banri.

Pilihan pada La Pawawoi Karaeng Segeri sebagai raja didasarkan atas pengabdian yang telah ditunjukkan selama ini. Pada waktu Pemerintah Hindia Belanda menyerang Bone pada tahun 1859, Singkeru Rukka punya andil besar, setidaknya memberikan informasi tentang kekuatan Kerajaan Bone pada waktu Bone diserang pada tahun 1859-1860. La Pawawoi menerima segala persyaratan yang diberikan oleh Belanda sehubungan dengan status yang didapatkannya. La Pawawoi juga berjanji untuk mematuhi segala apa yang tertera dalam perjanjian itu. Penolakan Pemerintah Hindia Belanda atas rencana pelantikan yang akan dilakukan oleh *Dewan Adat Pitu* Kerajaan Bone memperjelas pada kita, bahwa hampir dapat dipastikan Kerajaan Bone ketika itu sudah menjadi boneka bagi Pemerintah Hindia Belanda. Dibatalkannya rencana pelantikan itu memberi dua indikasi.

Pertama, hal itu menunjukkan peran Pemerintah Hindia Belanda dalam banyak hal jauh lebih dominan dibandingkan dengan *Dewan Adat Pitu* Kerajaan Bone. *Kedua*, menunjukkan kelompok bangsawan di Kerajaan Bone tidak bersatu dan terbagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok yang masuk dalam pengaruh dan kekuasaan Belanda, ada yang anti Belanda dan ada juga yang tidak memihak. Selain itu Pemerintah Hindia Belanda telah berhasil menempatkan orang-orang pada jabatan penting dalam Kerajaan Bone.

Perubahan status Kerajaan Bone sehubungan kekalahannya baik langsung maupun tidak langsung, membawa dampak besar dalam pemerintahan tradisional di Kerajaan Bone. Keterbatasan para penguasa kerajaan untuk bertindak, karena terikat atas perjanjian yang ditandatanganinya bersama Belanda, juga diikuti dengan peran yang makin besar dari pihak Pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur jalannya kekuasaan di kerajaan ini. Di lain pihak, para penguasa di Kerajaan Bone juga membutuhkan tindakan nyata, untuk menunjukkan keberadaannya. Mereka secara moral berpihak kepada masyarakat,

sebagai satu kewajiban yang secara tradisional harus diwujudkan agar keberadaan mereka tetap mendapat tempat di masyarakat.

Perubahan sikap Pemerintah Hindia Belanda dalam memandang tanah jajahannya di akhir abad XIX, terutama daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, diwujudkan dengan kecenderungan untuk menguasai secara langsung pos-pos tertentu yang dianggap dapat memberi keuntungan ekonomi bagi Pemerintah Hindia Belanda. Demikianlah yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang ingin menguasai pelabuhan Pallime yang berada di Kerajaan Bone. Keinginan Belanda itu mendapat penolakan oleh raja Bone, La Pawawoi Karaeng Segeri, yang mengakibatkan pecahnya perang antara dua kuasa tersebut.

Hubungan antara kedua kuasa ini mulai meruncing ketika La Pawawoi tanpa sepengetahuan Pemerintah Hindia Belanda mengirim pasukannya ke Tana Toraja untuk membantu rakyat Toraja dalam mempertahankan diri dari gangguan penguasa-penguasa Enrekang. Selain itu hubungan yang kurang harmonis juga muncul ketika Pemerintah Hindia Belanda mencoba menguasai Pelabuhan Bajoe dan Pallime, terutama dalam hal penarikan pajaknya. Usaha ini tentu saja mendapat tantangan dan Kerajaan Bone menolak mentah-mentah keinginan Pemerintah Hindia Belanda itu. Sebab selama ini pemasukan utama kerajaan adalah dari penghasilan pajak yang dipungut dari kedua pelabuhan itu. Sikap Kerajaan Bone yang menolak keinginan Belanda memicu konflik antara keduanya. Pemerintah Hindia Belanda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Bone telah menyalahi kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memaksakan kehendaknya.

Kerajaan Bone beranggapan bahwa tuntutan Pemerintah Hindia Belanda adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya mencari-cari alasan untuk menyerang Kerajaan Bone. Bagi Pemerintah Hindia Belanda, tuntutan untuk menarik pajak pada dua pelabuhan itu dianggap masih wajar mengingat status dari Kerajaan Bone sebagai Kerajaan Pinjaman. Dua titik pandang yang berbeda ini menjadi cikal bakal lahirnya konflik yang kemudian meletus menjadi perang besar pada tahun 1905 (*Lontarak Rumpakna Bone*).

Pada bulan Juli 1903, van Hoevell diganti oleh C.A. Kroesen yang tampaknya memiliki haluan politik yang lebih keras dan lebih ambisius untuk meluaskan wilayah imperium Belanda. Pada bulan Juni 1903

terdengar desas-desus permusuhan yang ditujukan pada Bone. Rakyat Bone menunjukkan kemarahan ketika pada bulan Juli diberitakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda akan menurunkan rajanya (Locher-Scholten, 1991:151-152).

Secara umum imperialisme Belanda dapat dibagi atas tiga bagian. *Pertama* dikenal dengan masa imperialisme ragu-ragu yang berlangsung antara 1873-1894/95. Imperialisme ini ditandai dengan Perang Aceh. *Kedua* adalah masa pertumbuhan yang berlangsung antara tahun 1894/96-1909, dan *ketiga* adalah antara tahun 1909-1915. Masa pertumbuhan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz (1904-1909), ditandai dengan kebijakan Aceh yang baru sejak tahun 1896, penegakan kekuasaan Belanda di Papua tahun 1898, ekspedisi ke Jambi 1901-1907 dan Kerinci 1902, Borneo Tenggara 1904-1906, Sulawesi Selatan 1905-1907, Bali 1906, Flores 1909 dan bagian lain kepulauan ini (Locher-Scholten, 1991:151-152).

Pada tanggal 20 dan 27 Juli serangan dilancarkan ke atas Bajo. Setelah berlangsung beberapa hari, serangan memamatkan dilancarkan pada tanggal 27 Juli. Serangan itu sendiri mendapat perlawanan dari pasukan Bone. Dalam catatan arsip Belanda, perlawanan yang dihadapi oleh Belanda di daerah ini merupakan perlawanan yang cukup berat.

Setelah berhasil menaklukkan Bone, serangan militer Belanda selanjutnya ditujukan kepada Kerajaan Luwu dan Gowa. Dua kerajaan yang memiliki hubungan keluarga dengan Kerajaan Bone. Belanda sangat yakin bahwa tanpa menaklukkan Luwu dan Gowa, jatuhnya Bone belum menjamin kemenangan Belanda di Sulawesi Selatan. Meskipun mendapat perlawanan, namun akhirnya kedua kerajaan ini harus tunduk kepada Pemerintah Hindia Belanda.

Asisten Residen Bone yang memerintah dari tahun 1907 sampai 1909, merumuskan keadaan yang dihadapinya di Bone sebagai berikut :

“Sejauhmana para kepala berada di bawah kendali kita, sulit untuk dinilai. Juga disebutkan bahwa para bangsawan yang dahulu berkuasa dan kini terikat tetap memilih kondisi lama daripada kondisi sekarang. Pertanyaan tentang kesetiaan mereka juga tidak menyangkut masalah apakah mereka lebih menyukai kondisi sekarang daripada

sebelumnya, namun ini menyangkut apakah mereka siap dalam cara pemerintahan sekarang untuk menerimanya, karena beberapa saat yang lalu mereka mencoba melawan. Pada umumnya para bangsawan menurut dugaan bisa dianggap terpercaya. Mereka bersedia bekerjasama untuk melaksanakan aturan-aturan baru, untuk membuat jalan dan jembatan, untuk menangkap para penjahat, namun tidak pernah memberikan bantuan dalam menangkap mereka yang telah memberontak melawan pemerintah” (Ijzeeref 1994).

Penguasa sipil J. Doerlleben, yang memerintah dari tahun 1910-1913, mengakui bahwa kelompok bangsawan Kerajaan Bone statusnya sudah tidak sama lagi seperti yang mereka nikmati sebelum serangan tahun 1905. Meskipun di sana-sini ada upaya yang dilakukan oleh kelompok bangsawan tinggi untuk bangkit karena ketidaksetujuan mereka terhadap keadaan yang dialami, namun upaya mereka tampaknya terpendam karena ganjaran yang mereka hadapi sehubungan dengan usahanya itu akan berakibat fatal, tidak saja dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarganya.

Ketika struktur pemerintahan di wilayah Kerajaan Bone ditata ke dalam beberapa distrik, Pemerintah Hindia Belanda mengangkat dan menempatkan mantan anggota *Dewan Adat Pitu* untuk mengepalai beberapa distrik. Usaha itu dilakukan untuk meredam kemungkinan munculnya gejolak dari kaum bangsawan yang merasa tidak puas. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda tampaknya kurang berhasil dan tidak bertahan lama. Kepala distrik di banyak tempat tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan wibawa dan pengaruh yang dimilikinya tidak cukup kuat untuk dapat menjalankan tugasnya.

Pemerintah Hindia Belanda kurang menyadari bahwa dalam struktur pemerintahan tradisional di bekas Kerajaan Bone, terdapat sejumlah *wanua* yang memiliki otonomi yang besar yang memiliki hubungan dengan pusat pemerintahan dengan memberikan upeti sebagai tanda bahwa daerahnya adalah bagian dari Kerajaan Bone. Dalam banyak hal mereka sebenarnya merdeka. Kehidupan mereka diatur sendiri oleh kepala daerahnya. Mereka hanya membayar upeti sebagai bagian dari Kerajaan Bone, tetapi bukan sebagai daerah yang dijajah.

Mereka menggabungkan diri pada pusat kerajaan semata-mata karena nama besar yang dimiliki oleh kerajaan Bone. Nama besar itu setidaknya dapat menyelamatkan daerahnya dari gangguan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang sewaktu-waktu dapat membahayakan mereka. Demikianlah yang terjadi pada daerah Lamuru yang pernah mendapat serangan dari Kerajaan Soppeng. Raja Bone kemudian menyerang Soppeng dan memperingatkan bahwa Lamuru adalah wilayah Kerajaan Bone.

Di samping itu ada juga daerah yang hanya diberi tugas untuk menyediakan kayu misalnya untuk kepentingan kerajaan, jika kewajiban itu sudah terpenuhi mereka sudah bebas dari kewajiban lainnya. Pemerintah Hindia Belanda tidak melihat tentang hal itu. Pemerintah Hindia Belanda melihat pada efisiensi dengan menggabungkan beberapa daerah yang secara historis berbeda.

Terdapat pula daerah yang memiliki hubungan dengan pusat karena memiliki hubungan geneologis dengan Raja Bone, bukan pada Watampone sebagai pusat pemerintahan. Ikatan geneologis ini menjadikan daerah itu memiliki hubungan emosional dan mendapat perlakuan istimewa. Perkawinan adik raja Bone yang ke-2 dengan *arung* di Palakka yang bernama La Patikkeng, adalah upaya untuk memasukkan daerah Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone yang ketika itu masih berjumlah tujuh wilayah atau daerah. Masuknya Palakka sebagai bagian dari Kerajaan Bone menjadikan Kerajaan Bone semakin besar dan kuat.

Ada pula daerah yang memiliki hubungan dengan pusat pemerintahan karena daerah itu ditaklukkan. Sebagai daerah yang ditaklukkan, mereka mempunyai kewajiban yang besar, misalnya dengan menyediakan sejumlah orang jika kerajaan dalam bahaya. Mereka tidak saja harus membayar upeti tetapi juga melayani kebutuhan dari kerajaan.

Selain itu pula, ada *wanua* yang secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat dengan pusat kekuasaan di Watampone karena *wanua-wanua* itu adalah inti dari Kerajaan Bone itu sendiri. *Wanua-wanua* itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak sedikit juga *wanua-wanua* yang bergabung dalam Kerajaan Bone karena kalah perang yang akhirnya tunduk dalam kekuasaan Kerajaan Bone. Ada juga *wanua* yang tunduk pada kekuasaan pusat karena memiliki hubungan geneologis dengan raja yang berkuasa.

Pada awal tahun 1930-an muncul pandangan baru terhadap kelompok bangsawan yang ada di daerah ini. Pemerintah Hindia Belanda khawatir terpinggirnya kelompok bangsawan dalam sistem sosial dan politik akan berakibat fatal bagi kelangsungan pemerintahan Hindia Belanda. Ketidakpuasan yang ditunjukkan dengan muncul gerakan-gerakan mesianis yang melibatkan banyak bangsawan, setidaknya dapat menjadi bukti tentang hal itu. Selain itu pula, gerakan nasionalisme yang mulai berhembus di Sulawesi Selatan sangat dikhawatirkan Pemerintah Hindia Belanda. Jika para elite bangsawan melibatkan diri dalam organisasi-organisasi politik, akan dapat dipastikan sangat merepotkan Pemerintah Hindia Belanda dalam mengatasinya. Oleh karena itu diperlukan satu usaha yang lebih kongkrit untuk merangkulnya. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengembalikan kekuasaan para elit bangsawan seperti sebelum serangan Belanda pada tahun 1905.

Usaha untuk merangkul elite bangsawan Bone sebenarnya telah dimulai sejak munculnya gerakan-gerakan yang menentang pendudukan Belanda, terutama sejak tahun 1915. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengembalikan struktur pemerintahan Kerajaan Bone, yaitu membentuk kembali *Dewan Adat Pitu* dan jabatan *To-marilalang*. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda itu diharapkan dapat meredakan gejolak ketidakpuasan dari kalangan bangsawan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi.

Terbentuknya tatanan lama tidak membawa dampak luas seperti yang diharapkan. Jabatan *To-marilalang* yang diciptakan kembali oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Jabatan ini dimasa lalu ditempati oleh orang dekat raja yang berfungsi untuk menyebarkan putusan raja yang berkaitan dengan kebijakan politik yang diambil oleh raja. Selain itu *Dewan Adat Pitu* yang juga diciptakan kembali tidak sepenuhnya dapat berfungsi karena ia bertugas di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, dan digaji oleh Pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Pada tahun 1931 *To-marilalang* Bone, Andi Maddusila Daeng Paraga atas nama Dewan Adat Pitu dan seluruh rakyat Bone datang menghadap La Mappanyukki untuk berkenan menjadi raja di Kerajaan Bone. Tawaran itu diterima oleh Andi Mappanyukki. Pemerintah Hindia Belanda kemudian meminta ke Batavia agar seluruh alat-alat kebesaran

kerajaan yang dirampas pada waktu penyerbuan pada tahun 1905 dikembalikan ke Kerajaan Bone. Alat-alat kebesaran itu sangat penting karena ia dapat melegitimasikan kedudukan seorang raja.

Diangkatnya Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti Bone sekarang menjadi satu daerah Swapraja (*Zelfbestuur Landschap*) berdasarkan *Korte Verklaring* yang ditandatangani oleh Andi Mappanyukki. Daerah Soppeng, Wajo dan Bone kemudian dijadikan satu *Afdeling*, di bawah pemerintahan seorang *Asistent Resident*. Dengan pelantikan Andi Mappanyukki sebagai raja Bone berarti sistem pemerintahan tradisional sudah dapat dipulihkan kembali.

KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelompok bangsawan Bone dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. *Pertama*, bertahannya mitos *to-manurung*. *To-manurung* merupakan simbol legitimasi kekuasaan bagi seluruh kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di Kerajaan Bone. Cerita ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga diterima oleh rakyat Bone sebagai satu kepercayaan. Ada tiga hal pokok dalam penceritaan *to-manurung* sehingga menempatkan bangsawan pada posisi strategis untuk tetap dapat bertahan. *Pertama* penceritaan mitos *to-manurung* itu telah menempatkan elite bangsawan keturunan *to-manurung* sebagai figur sentral dan tidak terbantahkan untuk tetap berkuasa karena legitimasi yang diperolehnya lewat rakyat melalui perjanjian antara *to-manurung* dengan ketujuh kelompok *wanua*. *Kedua* mitos itu telah menempatkan elite bangsawan Bone keturunan *to-manurung* menduduki strata tertinggi dalam lapisan masyarakat karena kekuasaan yang dimilikinya mampu menggerakkan masyarakat untuk percaya akan keabsahan kekuasaan yang dimilikinya. *Ketiga* mitos ini dapat bertahan tidak saja lewat penceritaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga dapat dibumikan lewat penulisan dalam *lontarak* sehingga bertahan lama.

Kedua, terbinanya jaringan keluarga. Perkawinan politik yang dilakukan oleh elite bangsawan Bone merupakan salah satu bentuk strategi kekuasaan dalam memperluas jaringan kerajaan dan bangsawan Bone. Perkawinan itu sendiri telah memberi peluang besar bagi bangsawan

Bone untuk dapat menduduki posisi raja di beberapa kerajaan. Hal ini menjadi modal sosial bagi bangsawan Bone agar tetap dapat bertahan. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan sejarah dan budaya oleh aparat penguasa Pemerintahan Hindia Belanda dalam menata daerah ini. Penataan administrasi pemerintahan oleh Belanda melalui sistem birokrasi modern yang lebih menekankan pada efisiensi, rasionalitas di Kerajaan Bone nampaknya salah kaprah karena tidak melihat sejarah panjang kehadiran kerajaan ini. Pihak Pemerintah Hindia Belanda cenderung melihat pada soal efisiensi dalam menjalankan pemerintahannya dan cenderung menyederhanakan kompleksitas hubungan raja/bangsawan-rakyat. Kebijakan itu dapat dilihat dari penyederhanaan dalam penataan pemerintahan beberapa wilayah kerajaan Bone oleh Belanda justru memunculkan tidak efisiennya birokrasi. Demikianlah yang dilakukan atas beberapa wilayah di Kerajaan Bone, disatukan dalam satu wilayah pemerintahan yang disebut distrik. Penyatuan ke dalam satu distrik tanpa melihat latar belakang sejarahnya, membuat sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. *Keempat*, peran besar yang dimainkan oleh elite bangsawan Bone di Sulawesi Selatan dalam proses dan pascakemerdekaan. Masa pendudukan Jepang yang singkat (1942-1945) di Indonesia dan Sulawesi khususnya adalah suatu periode di mana sikap kompromistif bangsawan Bone dengan penguasa baru, diperlihatkan. Pada masa Jepang berkuasa kelompok bangsawan di Bone dan di Sulawesi Selatan pada umumnya menerima baik, bahkan dielakukan sebagai saudara. Ada hubungan simbiosis mutualistis antara pendekatan Jepang terhadap para bangsawan Bone dan keuntungan yang diperoleh mereka dari Jepang dan sebaliknya. Selain karena pihak Jepang sendiri mendekati para bangsawan, pihak bangsawan juga melihat kesempatan ini sebagai peluang dalam mempertahankan eksistensinya.

Perkawinan, baik yang dilakukan antara sepupu satu kali, dua kali ataupun tiga kali, tidak saja secara kuantitas telah menjadikan jaringan kekerabatan kelompok bangsawan Bugis semakin bertambah dan meluas di Sulawesi Selatan, tetapi juga secara kualitas telah menghasilkan darah bangsawan yang 'kental'. Perkawinan yang dibangun karena memiliki hubungan darah, telah menjadikan mereka lebih menaruh perhatian pada hubungan yang terjalin karena ikatan darah itu. Keran demokrasi yang kini terbuka luas, telah dimanfaatkan kembali oleh para kelompok bangsawan yang telah memiliki jaringan yang luas. Dapat dipastikan

bahwa pertarungan memperebutkan orang nomor satu dan dua di daerah-daerah, baik sebagai bupati, camat atau kepala desa, adalah pertarungan antara kelompok bangsawan yang tidak saja ingin meraih apa yang diperebutkan, tetapi juga untuk memperlihatkan keluasan jaringannya. Keadaan yang demikian ini akhirnya dapat mengakibatkan munculnya hubungan patron-klien yang semakin mengikat, dan jika hal ini tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan suburnya praktek-praktek nepotisme.

PUSTAKA ACUAN

Buku dan Jurnal

- AA GN Ari Dwipayana, 2004. *Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota* (Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Abd. Latif. 1997. *Yang Menentang dan Yang Bersahabat Inggris di Sulawesi-Selatan 1812-1816*. Yogyakarta: Tesis S-2, Jurusan Sejarah, UGM, 1997.
- Abd. Rahim dan Ridwan Borahima, 1974. *Sejarah Kerajaan Tallo' (Suatu Transkripsi Lontara')*, Ujung Pandang: Pemda Tkt I Sul-Sel P3NBS Sul-Selatan.
- Abd. Rahim Mone dan A. Gani, 1988. *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Sejarah Tallo*, Jakarta: Depdikbud Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Abdur Razak Daeng Patunru, 1983. *Sejarah Wajo*. Ujung Pandang: YKSS.
- Abdur Razak Daeng Patunru, 1993. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: YKSS, 1993.
- Abdur Razak Daeng Patunru, dkk., 1995. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: YKSS.
- Ahmad M. Sewang. 1997. *Islamisasi Kerajaan Gowa*. Jakarta: Disertasi S-3 pada IAIN Syarif Hidayatullah.
- Andaya, Leonard Y., 1981. *The Heritage of Arung Palakka A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, BKI deel 90. Leiden/The Hague-Martinus Nijhoff.
- Bakkers, J.A. 1866. "Leenvorstendom Boni" dalam *Tijd van Inlandsche Taal-Land-en Volkenkunde*, tahun XI, No. 2. hlm. 1 – 209.
- Blok, R., 1848. "Beknopte Geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhorigheden", dalam *TNI*.
- Ball, R. Alan. 1993. *Politik dan Kerajaan moden* (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cetakan pertama.

- Brink, H. van den. Dr. Benjamin Frederick Matthes, 1943. *Zijn Leven en Arbeid in Dienst van Het Nederlandsch Bijnelgenootschap*. Amsterdam.
- Burhan Djabier Magenda, 1989. *The Surviving Aristocracy in Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Islands*. Michigan: Cornell University.
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chabot, H.Th. 1956. *Verwantschap Stand en Sexe in Zuid Celebes*. Groningen: University Press.
- Chaniago. J.R. 2002. *Menuju Negara Kesatuan RI: Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur (Disertasi)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Cummings, William. 2002. *Making Blood White: Historical Transformation in Early Modern Makassar*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Daud Limbugau dan Suriadi Mappangara, 1991. *Gerakan Protes Petani Unra*. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Edward L. Poelinggomang. 2002. *Makassar Abad XIX Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta : Gramedia.
- Edward L. Poelinggomang, 2004. "Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942", Yogyakarta : Ombak.
- Friedericy, H.J. 1933. *De Standen bij de Boegineezen en Makassaren*. Nijhoff-'s-Gravenhage.
- Hall, D.G.E., 1988. *Sejarah Asia Tenggara*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Gama Press.
- Ichlasul Amal. 1992. *Regional and Central Government in Indonesia Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949 – 1979*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, first printing.
- Ijzereef, Willem. 1994. *De wind en de bladeren: Hierarchie en autonomie in Bone en Polombangkeng, 1850 – 1950*. Disertasi. Groningen: Rijksuniversiteit.
- Iver, Mac. 1980. *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru.
- Jan Friedericy, Herman, 1933. "De Standen Bij de Boegineezen En Makassaren", dalam *BKI deel 90*.
- Kies, Ch. 1935. "De Expeditie Naar Zuid Celebes In 1905", dalam *IG*, bagian I, hlm. 827 – 830.

- Kooreman, P.J. 1883. “*De feitelijke toestand in het Goevernement- gebied in Celebes en onderhoorigheden*”, dalam *IG* (Thn. V, No. 1), hlm. 179 – 204, 358-385, 482-499. No.II, hlm. 135-170, 346-359.
- Kavanagh, Dennis. 1987. *Budaya Politik* (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Keller, Suzanne. *Penguasa dan kelompok Elit. Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lasswell, Harold D. 1986. *Politik: Siapa Mendapat Apa, Bila, Bagaimana* (terjemahan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Matthes, B.F. 1860. *Makassarsche Chrestomathie*, Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
- Mattulada. 1995. *Latoa Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Niel, Robert van. 1984. *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pelras, Christian. 1996. *The Bugis*, Oxford: Blackwell Publisher’s.
- Perelaer, M.T.H. 1872. *De Bonische Expedition Krijgsgebeurtenissen op Celebes ini 1859 – 1860*. Leiden : Gualth. Kolff, eerste deel.
- Pooze, Harry A. dan Pim Schoorl. 1991 *Excursies in Celebes*. Leiden: KITLV Uitgerij.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R.A. Kern, 1947. Proeve van Boegineesche Geschiedschrijving, dalam *BKI*, deel 104.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., 1973. *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5.
- Sartono Kartodirdjo, dkk., 1987. *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundigen Overzicht van Nederlandsch-Indie*. Jakarta: ANRI, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 4.
- Suriadi Mappangara, 2003. *Sejarah Bone*, Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel.
- Ligtvoet, A. 1880. “*Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tallo, met Vertaling en Aanteekeningen*,” dalam *BKI* deel V.
- Rookmaker, H.R. 1924. “*Oude en nieuwe toestanden in het voormalige vorstendom Bone*”, dalam *Indische Gids*, XLVI. Hlm. 397-417, 508-527.

Sutherland, H.A., 1980. “*Political Structure and Colonial Control In South Sulawesi*”, dalam Schefold R,J.W.Schoorl dan J. Tennekes, (ed.), dalam *Man Meaning and History*, BKI 89. KILTV:Leiden.

Sutherland, H.A., 1983. “*Power and Politics in South Sulawesi: 1860 – 1880*”, dalam: *RIMA*, XVII, 1983. Hlm. 161 – 207.

Makalah, Artikel dan Disertasi

Elsbeth Locher-Scholten, 1991. ‘Een gebiende noodzakelijkheid’ Besluitvorming rond de Boni-expeditie 1903-1905, dalam *Excursies in Celebes* (Leiden: KITLV Press, 1991).

Hasan Walinono. 1982. *Tanete. Suatu Studi Sosiologi Politik*. (Disertasi). Ujungpandang: Universitas Hasanuddin.

Shri Heddy Ahimsa Putra 2006. “*Nilai-Nilai Budaya Politik Dalam Mitos To-Manurung di Sulawesi Selatan.*” (Makalah). (Disampaikan dalam Seminar Nasional di Enrekang, 29 Mei 2006)

Naskah lontara dan Arsip

Lontarak Akkarungngeng ri Bone

Lontarak Kerajaan Tanete dan Hubungannya Dengan Tellumbocoe.

Lontarak Silsilah Kerajaan Suppa dan Hubungannya dengan Kerajaan Tellumpocoe.

Lontarak Silsilah Tellu Bocoe.

Lontarak Soppeng

Lontarak Rumpaqa Bone.

Lontarak Attoriolong ri Bone

Lontarak Bone (yang ditemukan di Istana Besse Kajuara di Passempa pada tanggal 9 Desember 1859)

Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok Jilid I dan II

Sumber Arsip:

ANRI, *Bundel Makassar* No. 153.

ANRI, *Bundel Makassar* No. 155.

ANRI, *Bundel Makassar* No. 359.

ANRI : *bundel Makassar, No.291/6.*

- ANRI, *Memorie van Overgave* L.A. Emanuel 1945 – 1948. Asisten Residen Bone.
- ANRI, *Memorie van Overgave*, W.A. C. Veen, Asisten Resident Bone, 31 Oktober 1936.
- ANRI, *Memorie van Overgave* F.C. Vorstman 1924. Residen Celebes
- ANRI, *Memorie van Overgave*, H.R. Rookmaker, Kontrolir Bone 1917,
- ANRI, *Memorie van Overgave*, C.A. Kroesen (April 1903 – Sept. 1904),
- ANRI, *Memorie van Overgave*, Celebes I, C.A. KroeseN, , Den Haag, September 1906, ARA
- Politiek Verslag van Het Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden over het 1e halfjaar 1934. Lijs van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 6, Mr. 1934, Bundel 3 (koleksi Anri, Jakarta.
- Politiek Verslag van Het Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden over het 1e halfjaar 1934. Lijs van de Politieke verslagen seri 4e, Reel 7, Mr. 1935, Bundel 4 (koleksi Anri, Jakarta.